

PELUANG DAN TANTANGAN KURIKULUM DI MASA PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA

Celi Azzahra

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
celia88.tebas@gmail.com

Hesti Irnawati

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
vivo74632@gmail.com

Nisah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
nisaayundarii@gmail.com

Sulastri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Laastri291@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of education in Indonesia during the Japanese period has implications on various types and levels of education. The progress of educational institutions during the Japanese period can be seen in terms of the establishment of madrassas and boarding schools in remote areas, remote villages. Curriculum and methodology of education in Indonesia during the Japanese curriculum changes, namely the eradication of the curriculum of teaching dualism and the inclusion of Indonesian and Japanese languageteaching curriculum, as well as funding assistance for the improvement of education curriculum. The educational methods applied are classical methods and teaching methods. Classical methods, held in schools, and teaching methods are applied in boarding schools.

Keywords: Curriculum, Japan

ABSTRAK

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa jepang berimplikasi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Kemajuan lembaga pendidikan pada masa jepang dapat dilihat dari segi pendirian madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil, pelosok desa. Kurikulum dan metodologi pendidikan di Indonesia pada masa Jepang terjadi perubahan kurikulum, yakni terhapusnya kurikulum dualisme pengajaran dan dimasukkannya kurikulum pengajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang, serta adanya bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Adapun metode pendidikan yang diterapkan adalah metode klasikal dan metode pengajian. Metode klasikal, diselenggarakan di sekolah sekolah, dan metode pengajian diterapkan di pondok-pondok pesantren.

Kata kunci: Kurikulum, Jepang.

PENDAHULUAN

Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Perkembangan ekonomi dan industri Jepang

memberi gambaran bahwa tampaknya perluasan wilayah itu mutlak diperlukan sehingga memperluas wilayah jajahan dan kejayaannya, bahkan mencapai masa keemasan setelah menguasai Belanda di Indonesia, dan penguasaannya itu, meliputi berbagai bidang termasuk pada sektor pendidikan di Indonesia. Sejarah awal pendidikan di Indonesia, berkaitan erat dengan sejarah awal datang dan masuknya Islam di Negara ini.

Pendidikan di Indonesia dalam perspektif sejarahnya, memiliki keunikan tersendiri, dan berperan penting dalam memajukan kebudayaan Islam, Terutama di masa kerajaan, masa penjajahan Belanda dan masa Jepang. Khusus di masa Jepang, bertepatan dengan terjadinya Perang Dunia II antara tahun 1938-1945 di Indonesia, dan pertama kali Jepang mendarat di Indonesia, tepatnya di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Bandung sebagai pusat Pertahanan Belanda dibombardir Jepang Dan Belanda menyerah tanpa syarat (Taufiq:2001). Sebagai penjajah, Jepang jauh lebih kejam dari pada Belanda. Jepang merampas semua harta milik rakyat untuk kepentingan perang. Pada masa Jepang, pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan kebijakan Jepang yang hendak menghapus pelajaran Agama Islam dan diganti dengan pelajaran agama Shinto. Oleh karena itu bahasa dan aksara Arab dikurangi frekuensinya, serta pendidikan pada umumnya mendapat penekanan (Musyifah Sunanto:2005)

Jepang memahami bahwa salah satu jalan untuk menguasai bangsa Indonesia, adalah melalui jalur pendidikan, sehingga Jepang merubah kurikulum pendidikan. Selain kurikulum pendidikan, berbagai upaya dan cara ditempuh Jepang Pada masa itu, termasuk sistem kelembagaan pendidikan, metodologi pengajaran, dan selainnya, yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Jepang selain menguasai kehidupan politik, ekonomi dan militer juga berusaha menguasai pendidikan bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Jepang untuk mempengaruhi sistem Pendidikan di Indonesia, dibalik semua itu sebenar Jepang tetap pada tujuan utama yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Jepang melakukan berbagai kebijakan agar pendidikan di Indonesia dapat mendukung perang yang sedang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan, dengan melihat kondisi tata ruang sebelum pembangunan jalan layang dan kondisi tata ruang yang ada sekarang, Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan pengaruh pembangunan jalan layang terhadap perkembangan kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kurikulum Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Pada Masa Jepang
Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia pada masa Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia ke II. Jepang mulai menguasai Indonesia pada tahun 1942, termasuk menguasai sistem pendidikan Islam. Ketika pasukan Jepang mulai berkuasa di Indonesia, bangsa Jepang memaksakan untuk melakukan tradisinya, yaitu menyanyikan lagu Kimigayo yang merupakan lagu kebangsaan Jepang, demikian pula diharuskan untuk melaksanakan Seikeirei, suatu cara memberi hormat dengan membungkukkan badan ke arah Kaeser Jepang, Tenno Neika yang dipercayai oleh masyarakat Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari (Lathiful Khuluq:2000).

Tradisi seperti ini jelas bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, yang berimbas pada sisi negatif terhadap eksistensi pendidikan di Indonesia. Para ulama dan tokoh pendidikan, seperti Hasyim Asy'ari menentang kebijakan Jepang tersebut. Sebagai akibat perlawanan yang dilakukannya ini, Hasyim Asy'ari mendapat tekanan dari pemerintah Jepang, bahkan ia pernah ditahan selama enam bulan, karena dituduh menentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam hubungannya dengan penahanan K.H. Hasyim Asy'ari ini, Saifuddin Zuhri telah menyatakan sebagai berikut: "KH.Hasyim Asy'ari, pemimpin pesantren Tebuireng dan Rais Akbar Nahdlatul Ulama ditangkap Jepang. Ia dimasukkan ke dalam penjara di Jombang, lalu dipindahkan ke penjara Mojekerto, dan akhirnya di penjara Bubutan, Surabaya. Beberapa kiai dan santri meminta dipenjarakan bersama-sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tanda setia kawan, sebagai tanda khidmah kepada guru dan pemimpin mereka yang telah berusia sekitar 70 tahun itu (K.H. Saifuddin Zuhri: 2001). Demikianlah gambaran perlawanan budaya terhadap kaum penjajah, Jepang yang dilakukan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dalam rangka perjuangan untuk merebut kemerdekaan, ia mengalami resiko yang berat, sebab pesantrennya dibakar oleh Belanda pada tahun 1913 dan dipenjarakan selama 6 bulan pada tahun 1942 di masa penjajahan Jepang (K.H. Saifuddin Zuhri: 2001).

Selanjutnya sejak awal pemerintahan Jepang, semua organisasi Islam di Indonesia yang tergabung dalam MIAI dibekukan, sehingga organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan, mengalami kesulitan dalam memajukan pendidikan, ini ditandai dengan mundurnya kegiatan pembelajaran di pesantren, madrasah dan pengajian. Pendidikan pun semakin menjadi terbengkalai dan terabaikan. Namun demikian madrasah di lingkungan pesantren beruntung, karena terbebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang, sehingga pendidikan dalam pondok Pesantren masih berjalan dengan wajar. Hal ini dapat terjadi karena letak pesantren yang terpisah dan terpencil. Di awal kedatangannya, kelihatan memang bahwa Jepang seakan-akan mendukung sistem pendidikan, hal ini terlihat bahwa:

- a. Pondok pesantren yang besar-besar sebagai institusi pendidikan Islam sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang
- b. Sekolah negeri dalam berbagai tingkatannya diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
- c. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH.Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan

Indikator seperti yang disebutkan di atas, merupakan alasan bahwa Jepang menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan di Indonesia, namun setelah pecahnya Perang Dunia II dan kedudukan Jepang terancam oleh sekutu, keadaan itu berubah secara drastis, tekanan terhadap pendidikan menjadi terancam, dan penduduk pribumi ditekan dengan cara Jepang menjalankan kekerasan untuk pembiayaan perang Asia Timur Raya. Jepang memberlakukan kerja paksa (ROMUSHA) juga membentuk pertahanan rakyat semesta, seperti Haiho, Peta dan Keiboda, sehingga perhatian terhadap dunia pendidikan semakin menurun. Kehidupan rakyat semakin tertindas dan menderita. Karenanya lahirlah pemberontakan-pemberontakan, ini berakibat banyaknya kiai sebagai tokoh pendidikan yang di tangkap. Dalam pada itu, umat Islam memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit memberontak melawan Jepang dalam upaya mereka memajukan pendidikan di Indonesia (Asman Hasan Fahmi:1999).

Sekolah, madrasah dan pesantren yang telah ada, bahkan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta menjadikan pendidikan zaman Jepang mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan sendiri, sehingga tanpa disadari oleh Jepang bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Pertama, Pendidikan Dasar (Koku-Min Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda
- b. Kedua, Pendidikan Lanjutan. Terdiri Dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 Tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.
- c. Ketiga, Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian (Suwendi :2004).

Sistem pelaksanaan pendidikan seperti yang disebutkan di atas, berimplikasi pada berkembangnya berbagai jenis dan jenjang pendidikan pada akhir zaman penjajahan Jepang, yang sebenarnya terdapat tanda-tanda kemajuan pendidikan, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil, pelosok desa. Dalam pada itu, tenaga pengajar yang dapat menunjang kegiatan pendidikan di masa Jepang, adalah tersebarnya ulama-ulama. Di sisi lain, pemerintah Jepang menyediakan kursus sekolah dan latihan bagi calon-calon guru. Adapun Sekolah yang dimaksud bagi calon tenaga pengajar yaitu:

- a. Sekolah Guru (SG) lama belajar 2 tahun yang dinamakan Sjootoo Sihan Gakkoo.
- b. Sekolah Guru Menengah (SGM) lamanya 4 tahun yang dinamakan Cutoo Sihan Gakkoo.
- c. Sekolah Guru Tinggi (SGT) lamanya 6 tahun yang dinamakan kootoo Sihan Gakkoo (Delliar Noer: 1982) Pengadaan sekolah-sekolah seperti itu semakin penting, manakala bersinggungan dengan usaha penanaman ideology Hakko Ichiu (kemakmuran Bersama) melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan latihan

guru-guru. Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideology baru. Latihan itu dipusatkan di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten mengirimkan wakilnya untuk mendapat gemblengan dari pimpinan Jepang. Sekembalinya ke daerahnya masing-masing, guru itu diwajibkan untuk meneruskan ideology baru itu kepada teman-temannya.

Kurikulum dan Metodologi Pendidikan di Indonesia pada Masa Jepang

Kurikulum pendidikan pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia terjadi beberapa perubahan yang penting, yaitu;

a. Terhapusnya Kurikulum Dualisme Pengajaran

Berbagai jenis lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda dihapuskan di masa Jepang. Oleh karena itu, riwayat susunan pengajaran yang dualistik telah berakhir. Dualisme yang dimaksudkan adalah pengajaran barat dan pengajaran bumi putra. Hanya satu jenjang sekolah yang diadakan untuk seluruh lapisan masyarakat ialah sekolah rakyat (SR) yang saat itu lebih populer dengan sebutan kokumun Gakkoo adapun Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. (Hasbullah : 2001). Berkenaan dengan itulah, maka jenjang pendidikan dan pengajaran di masa Jepang berdasarkan tingkatannya adalah, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk Sekolah Pertama), Sekolah Menengah tiga tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi tiga tahun (SMU pada zaman Jepang)

b. Kurikulum Pengajaran Bahasa Indonesia

Kurikulum pendidikan di setiap jenjang pendidikan, adalah dimasukkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi, yang sebelumnya mengalami penekanan. Pada masa Jepang atau era Nippon ini, cukup penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Dalam pada itu, maka Pelajaran Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, dan menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-Sekolah. Hanya saja kemudian, ada kompensasi lain yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai mata pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari, dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Berkenaan dengan itulah, diketahui bahwa Jepang lebih toleran dalam persoalan kurikulum (Suwendi:2004). Hal ini pula yang kemudian menjadi kurikulum pendidikan di masa Jepang lebih plural ketimbang di masa penjajahan Belanda. Dengan kata lain bahwa sikap penjajahan Jepang ternyata lebih lunak, sehingga gerakan pendidikan lebih bebas berkembang dibanding pada penjajahan Belanda.

c. Bantuan Dana untuk Pembenahan Kurikulum Pendidikan

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah, sehingga sekolah maupun madrasah dengan bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum seperti buku-buku pelajaran, dana yang diberikan, diperuntukkan untuk pengadaan buku-buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan. Berbeda dengan Pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Jepang membiarkan kembali dibukanya madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya, dan ini dilakukan bersinergi dengan pemberian dana

pendidikan yang diberikan. Namun dalam kenyataannya, pengawasan pemerintah Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian berlokasi di desa-desa terpencil sehingga bantuan yang diberikan terbatas pada sekolah-sekolah atau madrasah tertentu. Dengan dibukanya kembali sekolah dan madrasah-madrasah seperti yang disebutkan di atas, maka lembaga pendidikan pada itu, memiliki kesempatan untuk memasukkan unsur-unsur islam dalam kurikulumnya (K. Enung:2006).

Sekolah dan madrasah dapat melakukan tugasnya secara efektif, sehingga diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat. Itulah sebabnya, pembaruan kurikulum di lembaga pendidikan termasuk di pondok Pesantren pada masa Jepang mulai dilakukan sejak tahun 1940-an hal ini dapat ditandai dengan diajarkannya beberapa mata pelajaran umum mulai tahun itu, seperti bahasa Indonesia, Matematika, dan Geografi. Kemudian pada Tahun 1942 mulai pula diajarkan bahasa Jepang. Selanjutnya metode pendidikan, yakni metode pengajaran pada lembaga pendidikan yang diberlakukan pada zaman Jepang, terdiri atas dua, yakni metode klasikal dan metode pengajian. Metode klasikal, diselenggarakan di sekolah-sekolah melalui kegiatan program kurikuler dan kegiatan program ekstrakurikuler, yang berfokus pada pengembangan kemampuan belajar lebih lanjut bagi peserta didik. Sedangkan metode pengajian diselenggarakan di pondok-pondok pesantren yang menerapkan metode bandungan dan Sorogan.

Dimana seorang ulama mengajar santri-santri berdasarkan kitab kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedang santrinya tinggal dalam pondok atau asrama. Pondok pesantren di masa Jepang, tetap mempertahankan bentuk manajemen pendidikannya yang asli (tradisional). Metode klasikal dalam pendidikan di masa Jepang dilaksanakan pada pagi hari di sekolah sesuai jam dan waktu yang ditentukan dan mengarah pada program yang menekankan pencapaian tujuan secara sistematis dan terjadwal. Sedangkan metode pengajian kitab dilaksanakan oleh kiai atau badal kiai secara jama'i dalam kelompok besar santri tanpa Hirarki, yang arah pengajiannya lebih menekankan pada pencapaian membaca dan memahami teks kitab yang menjadi sumber tambahan dari sistem klasikal (Departemen Agama RI: 2009) Selanjutnya tentang metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan pada Masa Jepang, umumnya mengikuti pola metodologi pengajaran pendidikan seperti metode kisah, metode teladan, metode nasehat, metode pembiasaan, dan lain-lain. Menyoal metode kegiatan belajar Mengajar berdasarkan strategi yang digunakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, murid-murid atau peserta didik seringkali diharuskan melakukan Kinrohooshi (kerjabakti), seperti membersihkan bengkel-bengkel, asrama, kantor-kantor, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan militer Jepang di medan perang.

Peserta didik diharuskan membuat Rabuk kompos atau secara bersama-sama membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu belajar juga dihabiskan untuk bercocok tanaman jarak dan tanaman-tanaman lain baik di lingkungan sekolah

maupun di pingir-pinggir jalan, sebagai cara untuk menghasilkan bahan penting yang dibutuhkan bagi kelangsungan peperangan (k. Enung, Rukianti dan Hikmawati : 2006). Dari pada itu, ditemukan pula adanya latihan-latihan jasmani yang bersifat militerisme juga dilakukan agar berjalan lancar maka dibentuklah barisan-barisan tiap sekolah, Seinentai yaitu barisan murid Sekolah Rakyat dan Gakuto-tai yaitu barisan murid-murid sekolah lanjutan (K. Enung, Rukianti dan Hikmawati Fenti:2006).

Guna menanamkan semangat ke-Jepangan, maka setiap hari setiap murid harus mengucapkan sumpah pelajar, menghadap ke matahari terbit dan nyanyian serta mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Agar siswa terpacu, maka kadang-kadang diadakan perlombaan bahasa dan nyanyian-nyanyian Jepang. Hal ini juga berlaku bagi guru, pegawai dan orang yang sudah dewasa. Berdasarkan situasi ini, maka di satu sisi pelaksanaan pendidikan hampir separuh waktu belajar siswa dihabiskan untuk melakukan kinrohooshi (kerjabakti). Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap berjalan seperti yang disebutkan, meski ditemukan rintangan dan tantangan yang dihadapi karena adanya materi kurikulum yang bernuansa Jepang dimasukkan dalam setiap lembaga pendidikan.

Sistem Evaluasi Pendidikan Di Sekolah Pada Masa Jepang

Evaluasi guru diperlukan sebagai parameter untuk mengukur pencapaian prestasi kerja guru, sekaligus sebagai titik tolak pengembangan program pendidikan guru selanjutnya. Evaluasi guru juga merupakan bagian dari siklus keprofesionalan seseorang ketika dia memutuskan untuk menerjuni profesi guru (Nevo, D.:1994). Tetapi terlepas dari tujuan aslinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, kebijakan evaluasi guru juga diwarnai unsur politik yang melibatkan birokrat dan pertiakian partai (Sato, Akira dan Matsuzawa: 2002). Model evaluasi guru yang diterapkan di beberapa negara sangat bervariasi dengan faktor pembeda yaitu evaluator, materi evaluasi dan sangsi terhadap hasil evaluasi. Evaluator pada umumnya adalah atasan atau pengawas yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, wacana tentang perlunya mengedepankan akuntabilitas publik di dunia pendidikan memunculkan ide baru yaitu keterlibatan lembaga independen sebagai evaluator eksternal. Dan sejalan dengan itu, untuk meningkatkan penilaian internal, maka dikembangkan pula konsep self evaluation (jiko hyouka), yaitu guru sekaligus sebagai evaluator untuk dirinya sendiri. Selain itu juga dikenalkan evaluasi yang dilakukan oleh teman sejawat, siswa dan orang tua (Katsuno Masaaki:1992).

Penilaian terhadap hasil evaluasi diarahkan untuk bermacam tujuan di antaranya pemberian bonus, penentuan gaji guru, dan penentuan uang pensiun. US dan Inggris mempunyai sejarah panjang dalam penerapan sistem evaluasi guru, dan sistem di Jepang dipengaruhi secara kuat oleh kebijakan yang sama di kedua negara tersebut. Pelaksanaan evaluasi guru di Jepang sangat unik, karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan model yang sesuai kekhasan daerah. Tokyo misalnya memberlakukan sistem kenaikan dan pengurangan gaji berdasarkan skor penilaian. Sistem plus minus seperti ini tidak diikuti oleh daerah lain karena diduga akan memunculkan ketidakharmonisan dalam atmosfer kerja guru di Jepang.

Prinsip kerja dalam grup dengan mengedepankan keunggulan grup daripada individu adalah hal mendasar dalam kehidupan masyarakat Jepang, sehingga penerapan evaluasi yang akan berakibat kepada keunggulan pribadi tidak bisa diterima secara luas. Sistem evaluasi guru di Jepang dilatarbelakangi oleh unsur politik, yaitu paradigma baru pelayanan publik, atau yang dikenal dengan istilah NPM (New Public Management). Sistem ini merupakan salah satu konsep yang dikampanyekan dalam penerapan neo liberalism dalam bidang pemerintahan.

Beberapa prefektur cenderung untuk menerapkan evaluasi guru yang murni untuk meningkatkan kualitas guru dengan cara tidak mengkaitkan hasil penilaian dengan sistem penggajian dan pemberian bonus. Dengan tujuan yang lebih mengarah kepada fungsi pendidikan daripada fungsi ekonomi, materi penilaian menjadi sangat kompleks, dan beberapa poin menggambarkan gerak reformasi pendidikan di Jepang, yaitu pendidikan yang terbuka dan melibatkan peran serta masyarakat. Sebagian besar guru merespon negative terhadap kebijakan evaluasi guru yang berdampak kepada penggajian, sedangkan kepala sekolah cenderung bersikap akomodatif.

Kurikulum Pendidikan Masa Penjajahan Jepang Di Sambas

Jepang memberlakukan bahasa Jepang untuk digunakan di sekolah Sambas yang dibarengi dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tujuan Jepang dengan menyelipkan bahasa Jepang adalah untuk memperkenalkan budaya Jepang ke anak-anak didik Sambas.²⁰ Sifat yang lebih terbuka dibandingkan Belanda dan janji-janji manis Jepang, membuat masyarakat Sambas lebih percaya terhadap Jepang, sehingga Jepang memanfaatkan kesempatan ini dengan mendirikan berbagai organisasi Islam untuk menguatkan kedudukan Jepang di Sambas. Akan tetapi, niat Jepang untuk mempertahankan kedudukannya dengan mengambinghitamkan masyarakat Sambas membuat politik yang didirikan oleh Jepang di Kalbar, termasuk Sambas sehingga organisasi tersebut melakukan misi perlawanan kepada Jepang. Sebelum perlawanan dilakukan, ternyata Jepang terlebih dahulu mengetahui niat masyarakat Sambas melalui intel-intel polisi Jepang. Sejak saat itu, Jepang yang menerapkan kebijakan politik dari penjajahan simpati beralih ke penjajahan kekerasan dan penyiksaan.

Bentuk perlawanan pejuang Sambas untuk mendapatkan kemerdekaan yang sampai saat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan termasuk Kalbar dan wilayah-wilayah Kalbar lainnya sehingga pemerintah daerah menempatkan para pejuang Sambas sebagai tokoh pahlawan Sambas. Dengan demikian, dari beberapa sejarah datangnya Jepang ke Sambas untuk membantu masyarakat Sambas dari penjajahan Belanda, tetapi bantuan tersebut hanyalah sebagai bantuan yang menginginkan masyarakat Sambas untuk mengusir Jepang dan menggantikan kekuasaan Belanda oleh Jepang. Visi dan misi untuk membangun Sambas, hanyalah untuk menjadikan masyarakat Sambas sebagai budak yang melayani Jepang, termasuk dari segi pendidikan. Pendidikan hanyalah untuk mengenalkan tentang budaya Jepang yang patuh terhadap kaisar yang ingin diterapkan kepada masyarakat Sambas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa Jepang berimplikasi pada berkembangnya berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang sebenarnya Terdapat tanda-tanda kemajuan lembaga pendidikan, terutama dari segi pendirian madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil, pelosok desa.

Kurikulum dan metodologi pendidikan di Indonesia pada masa Jepang terjadi perubahan kurikulum pendidikan, yaitu terhapusnya kurikulum dualisme pengajaran, dimasukkannya kurikulum pengajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang, serta adanya bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Adapun metode pendidikan yang diterapkan adalah metode klasikal dan metode pengajian. Metode klasikal diselenggarakan di sekolah-sekolah, dan metode pengajian diterapkan di pondok-pondok pesantren.

Visi dan misi untuk membangun Sambas, hanyalah untuk menjadikan masyarakat Sambas sebagai budak yang melayani Jepang, termasuk dari segi pendidikan. Pendidikan hanyalah untuk mengenalkan tentang budaya Jepang yang patuh terhadap kaisar yang ingin diterapkan kepada masyarakat Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. Sejarah Umat Islam Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Aslan dan Hifza, Kurikulum Pendidikan Masa Penjajahan Jepang Di Sambas. *Edukasia Islamika* 4, no. 2 (15 November 2019):171-188, <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>.
- Departemen Agama RI, Pedoman Penye-Lenggaraan Pesantren Muadalah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidik-Kan Islam-Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, 2009.
- Enung, K. Rukiati dan Hikmawati Fenti, Sejarah Pendidikan Islam di Indo-Nesia. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Fahmi, Asmah Hasan. Sejarah dan Fil-Safat Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Murni Ramli, KEBIJAKAN EVALUASI GURU DI JEPANG. Juli 2008.<http://educationist.upi.edu/index.php/educationvolii-no2-juli-2008.html>
- Rusiadi Rusiadi and Aslan Aslan, “PEMBINAAN MAJELIS TAKLIM AL-ATQIYA’ DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH,” *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION* 4, no. 1 (January 1, 2024): 1–10.
- Joni Wilson Sitopu et al., “THE IMPORTANCE OF INTEGRATING MATHEMATICAL LITERACY IN THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM: A LITERATURE REVIEW,” *International Journal of Teaching and Learning* 2, no. 1 (January 4, 2024): 121–34.
- Meli Antika, Aslan, and Elsa Mulya Karlina, “PENERAPAN METODE PEMBIASAAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PADA ANAK KELOMPOK B1 DI TKIT YA BUNAYYA SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022-2023,” *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 7, no. 1 (January 17, 2024): 25–33.
- Tiara Nur Afni Nur Afni, Aslan Aslan, and Astaman Astaman, “PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN FIQIH DI KELAS IV MIS DARUL IHSAN SEPINGGAN PASCA KEBAKARAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023,” *Lunggu Journal* 2, no. 1 (January 22, 2024): 137–47.
- Bucky Wibawa Karya Guna et al., “Building Morality and Ethics Through Islamic Religious Education In Schools,” *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)* 5, no. 1 (February 9, 2024): 14–24, <https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>.

- Annisa Tri Rezeki and Aslan, "PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDIA," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 4, no. 1 (February 11, 2024): 57–63.
- Eliyah dan Aslan, "STAKE'S EVALUATION MODEL," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 2, no. 1 (14 Februari 2024): 27–39.
- Legimin dan Aslan, "PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 2, no. 2 (16 Februari 2024): 446–55.
- Muharrom Muharrom, Aslan Aslan, and Jaelani Jaelani, "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK PUSAT KEUNGGULAN SMK MUHAMMADIYAH SINTANG," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 3, no. 1 (January 2, 2023): 1–13.
- Nurhayati Nurhayati, Aslan Aslan, and Susilawati Susilawati, "PENGUNAAN TEKNOLOGI GADGET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA ANAK USIA DINI DI RAUDHATUL ATFHAL AL-IKHLAS KOTA SINGKAWANG," *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (August 6, 2023): 485–500.
- Munir Tubagus et al., "THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON ISLAMIC PESANTREN EDUCATION AND THE LEARNING OUTCOMES OF SANTRI: NEW TRENDS AND POSSIBILITIES," *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 3, no. 3 (September 8, 2023): 443–50.
- Aslan Aslan and Pong Kok Shiong, "Learning in the Digital Age Full of Hedonistic Cultural Values Among Elementary School Students," *Bulletin of Pedagogical Research* 3, no. 2 (September 8, 2023): 94, <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.515>.
- Sri Endang Puji Astuti, Aslan Aslan, and Parni Parni, "OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA," *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (June 12, 2023): 83–94, <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>.
- Aslan Aslan, "KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 1, no. 1 (April 6, 2023): 1–17.
- Erwan Erwan, Aslan Aslan, and Muhammad Asyura, "INTERNALISASI BUDAYA RELIGIUS OLEH GURU AKIDAH AKHLAK UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP AKHLAK MULIA DI MIS BINA DHARMA PARIT RABU," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 1, no. 6 (August 11, 2023): 488–96.
- Aslan Aslan and Kok Shiong Pong, "Understanding the Trend of Digital Da'wah Among Muslim Housewives in Indonesia," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 16, no. 1 (January 8, 2023): 11–22, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v16i1.681>.
- Laros Tuhuteru et al., "The Effectiveness of Multimedia-Based Learning To Accelerate Learning After The Pandemic At The Basic Education Level," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (March 21, 2023): 128–41, <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.311>.
- Ratna Nurdiana et al., "COLLABORATIVE PARTNERSHIPS FOR DIGITAL EDUCATION TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AT THE INSTITUTE OF ISLAMIC RELIGION OF SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, INDONESIA," *International Journal of Teaching and Learning* 1, no. 1 (September 18, 2023): 1–15.
- Aslan, *Pengantar Pendidikan* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), <https://id.scribd.com/document/630551603/Sampel-Buku-Pengantar-Pendidikan>.
- Sulastri Sulastri, Aslan Aslan, and Ahmad Rathomi, "STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENYAMPAIAN MATERI PADA ANAK TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023," *Lunggi*

Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner 1, no. 4 (October 10, 2023): 571 – 583.

Uray Sarmila, Aslan Aslan, and Astaman Astaman, “THE ROLE OF PARENTS TOWARDS YOUTUBE USERS IN BUILDING CHILDREN’S RELIGIOUS BEHAVIOR IN KUALA PANGKALAN KERAMAT VILLAGE,” *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJSAIS)* 1, no. 2 (October 25, 2023): 116–22.

Gamar Al Haddar et al., “THE REVOLUTION OF ISLAMIC EDUCATION THOUGHT IN THE ERA OF SOCIETY 5.0: CORRECTIONS AND ANALYSIS OF STUDIES IN ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SOUTH KALIMANTAN,” *International Journal of Teaching and Learning* 1, no. 4 (November 17, 2023): 468–83.